



ANCAMAN ASIMETRIS DALAM KERJASAMA *BELT AND ROAD INITIATIVE* DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA

DEFENSE STRATEGY OF INDONESIA TO OVERCOME ASYMMETRIC THREATS IN BELT AND ROAD INITIATIVE IN INDONESIA

Siti Mawaddah Palamani, Surryanto D.W., Yusuf Ali

PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN,
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(wadapalamani97@gmail.com, surryantodw_kemhan@yahoo.co.id,
yusufali8788@gmail.com)

Abstrak – Kerjasama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia dimulai pada tahun 2018 ketika Indonesia menandatangani MoU BRI dengan negara China. Kerjasama BRI yang berasal dari negara China telah mendapat banyak kritik atas jebakan hutang (*debt trap*) dan menjadi sebuah polemik dalam kerjasama ekonomi internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kerjasama BRI dapat menjadi ancaman bagi Indonesia serta bagaimana strategi pertahanan negara Indonesia untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama BRI oleh negara China yang dapat menjadi ancaman asimetris dalam kerjasama BRI ini serta menganalisis strategi pertahanan negara Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari ancaman yang terdapat dalam kerja sama BRI bukan hanya pada bidang ekonomi namun juga pada sektor pertahanan. Dibutuhkan strategi yang mampu menangkal ancaman tersebut, dan pemerintah Indonesia harus memperhatikan *contingency plan* jika terjadi *worst case* dalam pelaksanaan kerja sama ini. Peneliti memberikan rekomendasi yaitu diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan kerja sama BRI di Indonesia, serta pengkajian ulang mengenai kerja sama ekonomi internasional.

Kata Kunci : Ancaman Non-militer, Belt and Road Initiative, Kerja sama Ekonomi, Neo-Imperialisme, Peperangan Asimetris

Abstract – The *Belt and Road Initiative (BRI)* cooperation in Indonesia began in 2018 when Indonesia signed the BRI MoU with China. The BRI cooperation which originated in China has received a lot of criticism for its debt trap and has become a polemic in international economic cooperation. The problem in this research is about how BRI cooperation can become a threat to Indonesia and how Indonesia's national defense strategy is to anticipate these threats. The purpose of this study is to analyze the BRI cooperation by the Chinese state which could be an asymmetrical

threat in this BRI collaboration and to analyze Indonesia's national defense strategy in dealing with these threats. The method and design used in this research is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The result of this research is the impact of threats in BRI cooperation not only in the economic sector but also in the defense sector. A strategy that can ward off these threats is needed, and the Indonesian government must pay attention to the contingency plan in the event of a worst-case in the implementation of this cooperation. The researcher recommends that there is a need for supervision in the implementation of BRI cooperation in Indonesia, as well as a review of international economic cooperation.

Keywords: *Non-military Threats, Belt and Road Initiative, Economic Cooperation, Neo-Imperialism, Asymmetric Warfare*

Pendahuluan

Penelitian ini mengambil tema ancaman asimetris pada bidang ekonomi, khususnya dalam kerjasama *Belt and Road Initiatives (BRI)* yang berasal China. Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 mengumumkan rencana untuk membangun Jalur Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21, yang kemudian dikenal sebagai *Belt-Road Initiative (BRI)* (Kurniawan, 2016). Proyek BRI ini diarahkan untuk mendorong konektivitas yang lebih besar, aliran ekonomi, pertumbuhan kesempatan kerja, investasi, konsumsi, pertukaran budaya dan semangat kerja sama regional antara Asia (termasuk Indonesia), Eropa dan Afrika dengan menciptakan rute perdagangan yang dibangun bersama meniru Jalan Sutra kuno.

Kerjasama BRI di Indonesia dimulai pada tanggal 27 April 2019 di Beijing, ketika pemerintah Indonesia menandatangani 23 *Memorandum of Understanding* dalam agenda acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II *Belt Road Initiative* di Beijing. Kontrak kerjasama ini dilaksanakan secara *Business to Business (B to B)* antar perusahaan Indonesia dan China yang bekerja sama dalam proyek ini (Kompas.com, 2021).

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk 'mengawinkan' ide Poros Maritim atau *Global Maritime Fulcrum (GMF)* dengan proyek *Belt and Road Initiative (BRI)*. Sekilas, BRI dan GMF terlihat sangat saling melengkapi. Namun di sisi lain, sengketa maritim yang sering terjadi di wilayah Laut China Selatan dan terkait hak penangkapan ikan di dekat Kepulauan Natuna berpotensi menimbulkan tantangan yang membahayakan hubungan Indonesia-China dalam beberapa tahun terakhir (FES Asia.org, 2020).

Skema *business to business (B to B)* ini menjadi tameng bagi pemerintah Indonesia dalam menghindari jebakan hutang investasi China. Hal ini dikarenakan, utang tersebut akan dikategorikan sebagai utang swasta dan tidak membebani pemerintah sebagai utang negara. (Tempo.co, 2018)

Namun dalam perjalanannya, proyek BRI ini mengalami kendala di beberapa negara, seperti Sri Lanka, Pakistan, Nigeria dan Zimbabwe. Sebagai contoh di negara Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar hutang yang menjadi bentuk investasi dari China kepada negaranya, akhirnya pemerintah Sri Lanka melepas Pelabuhan Hambantota sebesar US\$1,1 triliun. Sri Lanka mengalami kegagalan pembayaran hutang karena hutangnya mencapai 77% dari PDB nya (Tagar.id, 2019).

Beberapa contoh negara yang telah disebutkan diatas telah mengalami dampak dari perang asimetris dalam bidang ekonomi melalui kerja sama BRI oleh China ini. Bangkitnya China sebagai kekuatan dominan dalam politik dunia mempraktikkan bentuk neo-imperialisme melalui penggunaan politik, ekonomi, dan kekuatan militernya.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menyusun suatu strategi pertahanan untuk membendung ancaman ini. Pertahanan negara sendiri merupakan upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka membangun dan mempersiapkan kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman sistem pertahanan semesta (UU No 3 th 2002).

Melihat bahwa kerja sama BRI dalam bidang ekonomi nyatanya mampu untuk mengalihkan kebijakan negara, mengubah mata uang dan mengambil alih infrastruktur kritis negara, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai serangan asimetris.

Sisi asimetris dalam kerjasama ini bukan dalam bentuk sanksi, embargo, restriksi perdagangan, atau hal-hal yang bersifat pembatasan dan pemutusan hubungan kerja sama yang kerap dikaitkan sebagai 'perang ekonomi', namun dapat berbentuk kerja sama antar-negara yang memiliki motif tertentu. Sehingga kerjasama yang seharusnya dapat meningkatkan kemajuan masing-masing negara yang justru dapat membawa kemerosotan

dan kehancuran bagi negara yang tidak memiliki kapabilitas untuk bertahan dan memenangkan perang asimetris dalam bidang ekonomi ini.

Oleh karena itu, maka potensi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi khususnya pada kasus kerja sama BRI ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai '*Debt Trap*' dari kerja sama BRI oleh negara China ini, dan menganalisis potensinya bagi Indonesia, yang menjadi salah satu negara yang bekerja sama didalam skema kerja sama BRI. Selain menganalisis ancaman terkait upaya hegemoni China melalui kerja sama BRI ini sebagai '*imperialisme model baru*' dalam tatanan dunia Internasional, penelitian ini juga akan merumuskan rekomendasi terkait strategi pertahanan negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangkalkan ancaman asimetris dalam bidang ekonomi khususnya pada kerja sama BRI ini.

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, berikut adalah Rumusan Masalah serta dari penelitian kali ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerjasama *Belt Road Initiative (BRI)* negara China dapat menjadi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi ?
2. Bagaimana strategi pertahanan negara Indonesia untuk menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi dalam kerjasama *Belt Road Initiative (BRI)*?

Kemudian, tujuan dari penelitian ini yang tentunya akan menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan yaitu :

1. Menganalisis kerjasama Belt and Road Initiative oleh negara China yang dapat menjadi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi di Indonesia
2. Menganalisis strategi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi khususnya dalam kerjasama Belt Road Initiative.

Dalam meneliti permasalahan terkait kerja sama investasi *Belt Road Initiative (BRI)* sebagai ancaman asimetris bidang ekonomi di Indonesia, peneliti mengambil beberapa landasan teori dan konsep yang sepadan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi

dalam kasus ini. Teori tersebut adalah Teori Strategi, Konsep Pertahanan Negara, Teori Ancaman, Teori Neo-Imperialisme, dan Konsep Peperangan Asimetris.

Dalam menganalisis kasus dalam penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus menggunakan teori Sun Tzu (Sun Tzu, diterjemahkan oleh Giles: 2000) khususnya dalam frasa “mengalahkan musuh tanpa berperang”. Kerja sama BRI dilihat menjadi strategi bagi negara China untuk dapat mengalahkan ‘musuh’ nya yaitu kompetitor dari negara lain seperti Amerika Serikat. Melalui kerja sama ini, China mampu bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengalahkan hegemoni kekuatan ekonomi yang sebelumnya.

Strategi yang digunakan oleh China dalam kerja sama BRI seyogyanya dapat dianalisis dan diprediksi ancamannya bagi negara-negara yang melakukan kerja sama dalam investasi tersebut. Jika ancaman tersebut telah diketahui, maka strategi yang dapat digunakan untuk menangkal ancaman tersebut adalah melalui ‘deception’ seperti apa yang dijabarkan oleh Sun Tzu. Melakukan yang sebaliknya dari apa yang diharapkan, mengetahui kelemahan lawan, dan mengacaukan strateginya adalah bentuk pertahanan terhadap ancaman musuh, tak terkecuali dalam kerja sama BRI ini.

Peneliti menggunakan teori ancaman dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, Buku Putih Pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2015), Buku Strategi Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan, 2014) dan konsep ilmu pertahanan dari Makmur Supriyatno (Supriyatno, 2014) . Relevansi penggunaan teori pertahanan menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis agar peneliti mampu melihat permasalahan penelitian dalam konteks pertahanan negara. Sesuai dengan tujuan dari pertahanan negara yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara secara fisik dan non fisik, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari disintegrasi dan disorientasi serta menjaga keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman baik ancaman militer maupun non militer yang datang dari dalam dan luar negeri.

Proyek kerja sama Belt Road Initiative (BRI) oleh negara China yang nyatanya telah mengganggu dan menjadi ancaman bagi pertahanan beberapa negara yang terdampak,

menjadikan Indonesia wajib waspada terhadap efek negatif yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama tersebut. Agar bisa mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Indonesia harus memiliki kemampuan *'defense'* atau bertahan, untuk dapat *'survive'* dalam perjalanan perjanjian kerja sama tersebut dan tidak mengalami dampak negatif seperti beberapa negara lain.

Peneliti menggunakan teori ancaman dari Stephen M. Walt (1987) dalam bukunya yang berjudul *"The Origins of Alliances"* yang menjelaskan mengenai konsep *Balance of Threat*. Di dalam *Balance of Threat* ini, aliansi terbagi dua kategori, yaitu: *Balancing* dan *Bandwagoning* (Walt, 1987) *Balancing* merupakan aliansi antara negara dengan negara lain melawan ancaman yang berlaku. Aliansi kategori ini juga dipertimbangkan di tingkat regional, dimana negara-negara menyiratkan keinginan untuk mempertahankan status quo.

Sementara *bandwagoning* secara konseptual menurut Kenneth Waltz (1978) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan yang lebih lemah untuk bergabung mengikuti negara yang memiliki kekuatan lebih besar demi mendapat tambahan kekuatan dan keamanan bagi negaranya dalam rangka menghadapi ancaman yang berlaku. Apabila Indonesia gagal mengidentifikasi ancaman dalam perjanjian kerja sama BRI ini, dan kemudian secara sadar maupun tidak mengalami *bandwagoning* dan menjadi *'aliansi'* dari negara investor yakni China, hal tersebut akan mengancam stabilitas politik luar Negeri di Indonesia yang sejatinya memiliki asas politik bebas-aktif, serta mengancam kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu, relevansi teori ini dengan tema penelitian yang dikaji adalah terkait ancaman kerjasama investasi BRI sebagai ancaman asimetris bidang ekonomi di Indonesia yang menjadi serangan asimetris dari negara lain dalam hal ini adalah negara China kepada Indonesia. Strategi asimetris dikenal sebagai strategi *'murah meriah'* namun memiliki daya hancur yang cukup tinggi dan dalam waktu yang lama.

Teori ancaman tersebut cukup relevan untuk dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, terkait dengan prediksi ancaman kedepan yang dihasilkan dari kerja

sama BRI di Indonesia. Kerjasama internasional pada intinya adalah perlombaan, peluang dan tantangan (Halkis, 2022) Penelitian ini juga menggunakan teori awal dari Neo-Imperialisme yakni Imperialisme menurut J.A. Hobson, yang memperkenalkan teori Imperialisme dalam bidang ekonomi (Hobson, 2005). Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 saat berkunjung ke Indonesia dan Kazakhstan dianggap sebagai jenis imperialisme baru. Perkembangan teori neo-imperialisme ini dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Pengendalian ekonomi tanpa harus menginvasi wilayah menjadi titik awal dari penggunaan teori Neo-imperialisme sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Kemampuan ekonomi China yang berkembang pesat kemudian menjadi salah satu 'emerging power' di dunia menempatkan China pada posisi negara yang kuat secara ekonomi. Tendensi dan intensi dalam penguasaan sektor ekonomi melalui kerja sama BRI ini dapat dilihat menggunakan teori Neo-imperialisme.

David L. Buffaloe (2006) dalam tulisannya yang berjudul "*Defining Asymmetric Warfare*" menjelaskan pengertian mengenai peperangan asimetris sebagai perang antara kekuatan populasi yang bersifat non tradisional bersaing dengan kemampuan militer yang lebih superior atau adanya kekuatan yang menjadi inferior yang mencakup aspek ancaman asimetris (*asymmetric threat*), operasi asimetris (*asymmetric operations*), pendekatan asimetris secara kultural (*cultural asymmetry*) dan pembiayaan dalam peperangan asimetris (*asymmetric cost*) (Buffaloe, 2006).

Serangan terhadap ekonomi suatu negara dapat dikategorikan sebagai asymmetric warfare dalam klasifikasi *Asymmetric Operations* yang dilakukan oleh negara yang lebih kuat secara power ekonominya terhadap negara yang lemah. Jebakan 'debt trap' yang akhirnya dapat mengubah kebijakan politik di suatu negara seperti pengambilalihan infrastruktur kritis negara yang berupa pelabuhan, perubahan mata uang yang merupakan bukti atas adanya kendali dari negara China terhadap kebijakan fiskal dan moneter di negara lain, hingga tentang isu tenaga kerja asing yang menjadi 'diaspora terstruktur'

dalam skema kerja sama BRI ini dapat mempengaruhi kondisi situasi dan stabilitas politik dan ekonomi di suatu negara.

Konsep ini juga akan menjelaskan bagaimana kerja sama ekonomi dan investasi dapat dipandang sebagai salah satu strategi peperangan asimetris yang dipakai oleh China selain untuk memperoleh keuntungan atas pangsa pasar Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar, namun untuk melemahkan dan merusak tatanan negara melalui perjanjian kerja sama yang memiliki dampak negatif terhadap suatu, tanpa disadari oleh negara tersebut, serta sebagai strategi dalam mencapai ambisinya menjadi hegemoni global dalam bidang ekonomi politik internasional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Burhan Bungin (2007) dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Kualitatif" menjelaskan bahwa penelitian sosial yang menggunakan format kualitatif-deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan, menyederhanakan situasi dan kondisi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek penelitian.

Objek penelitian adalah kerjasama Belt and Road Initiative (BRI) ini sementara fokus dari penelitian ini adalah strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman asimetris dalam bidang ekonomi. Sementara subjek penelitian ini adalah orang dan lembaga yang terkait yang berfungsi sebagai informan mengenai tema penelitian yang sedang berlangsung yaitu strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman asimetris bidang ekonomi dalam kerjasama BRI.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu :

1. Wawancara

Pada teknik ini, peneliti menggunakan rumusan dari Creswell (2011) untuk melakukan wawancara yaitu: Menentukan pertanyaan riset yang akan dijawab dalam wawancara. Adapun pertanyaan wawancara yang dipilih peneliti yaitu melaksanakan wawancara semi terstruktur, merekam dan menulis wawancara tersebut.

2. Studi dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, aarsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen dapat bersifat pribadi, maupun resmi (Bungin, 2007).

Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari wawancara.

3. Metode Penelusuran Data Online

Perkembangan internet yang semakin pesat dan maju akhirnya dapat bermanfaat bagi penelitian guna mencari sumber data yang terdapat di Internet melalui penelusuran dalam jaringan (online) (Bungin, 2007). Data yang didapatkan melalui penelusuran online ini dapat berupa laporan, grafik, tabel, jurnal, dan lainnya.

Teknik Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (credibility) khususnya pada teknik Triangulasi dan Diskusi Sejawat.

Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles and Huberman (2014) yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai titik jenuh.

Hasil dan Pembahasan

Geoekonomi Negara China dan Indonesia di Kawasan Asia.

Geoekonomi adalah studi tentang bagaimana perekonomian beroperasi dalam lingkungan internasional. Pada dasarnya, geoekonomi adalah studi akademis tentang pergerakan global modal, pasar, dan tenaga kerja. (Priyono, 2017)

Geoekonomi China menekankan pada langkah ke arah model ekonomi yang didasarkan pada "konsumsi domestik" dan "investasi luar Negeri". Sementara Indonesia menurut Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2019-2014 menyatakan bahwa prioritas pertama dalam politik luar negeri Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi.

Kerjasama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Indonesia melakukan tanda tangan *Memorandum of Understanding* kerjasama BRI ini dengan negara China pada tanggal 23 Oktober tahun 2018. Sementara itu, kerjasama BRI di Indonesia dimulai pada tanggal 27 April 2019 di Beijing, ketika pemerintah Indonesia menandatangani 23 *Memorandum of Understanding* dalam agenda acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II *Belt Road Initiative* di Beijing. Kontrak kerjasama ini dilaksanakan secara *Business to Business*.

Jalur kereta api dianggap oleh Beijing sebagai proyek BRI terpenting di Indonesia. Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek pembangunan transportasi antara Indonesia dan China. Dengan panjang jalur yang mencapai 150 km dan menelan biaya sekitar USD5,9 miliar, Kereta Cepat Jakarta – Bandung ini 40 persen sahamnya dimiliki oleh China Railway International. Proyek tersebut dimulai pada Januari 2016, tetapi telah terjadi banyak permasalahan di sekitar proyek. Pada Maret 2017, angkatan udara Halim di Jakarta menangkap beberapa pekerja China dengan pakaian seragam ala militer yang terkait dengan proyek di pangkalan udara tersebut. (Warta Kota Tribun News.com, 2016).

Kejadian penangkapan TKA yang merupakan eks kombatan di wilayah militer pangkalan udara Halim Perdanakusuma di Indonesia juga menjadi pertanda bahwa Indonesia masih lalai dalam mengatur dan mengawasi persebaran TKA dari China di

Indonesia. Negara harus mampu bersikap tegas mengatur masuknya TKA ke Indonesia. Background check secara berkala diperlukan demi menjaga keamanan dan pertahanan di Indonesia

Pro Kontra Terhadap Kerjasama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Sebagian besar narasumber menyetujui bahwa kerja sama BRI ini memiliki tujuan lain selain bisnis, namun memiliki motif dibaliknya. Penguasaan dalam bidang ekonomi, hingga pengaruh politik khususnya pada kasus Nine-Dash Line di wilayah Laut China Selatan turut menjadi tujuan khusus dari kerja sama BRI ini. Terutama mengenai keuntungan dimana kerja sama ini diinisiasi oleh negara China dan sudah tentu China ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik secara materil maupun pengaruh politik terhadap negara yang bekerja sama.

Meskipun demikian, Indonesia memang membutuhkan investasi untuk mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan infrastruktur, transportasi, penanaman modal asing, dan lain-lain diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia.

Melalui kerja sama BRI ini, Indonesia diharapkan lebih cermat dalam menilai untung rugi yang dihasilkan dalam kerja sama tersebut, agar dapat memberikan manfaat yang sepadan dengan apa yang diberikan oleh Indonesia dalam kerja sama tersebut.

Ancaman dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Kerjasama *Belt and Road Initiative (BRI)* di Indonesia

Dalam bidang pertahanan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kerja sama Indonesia – China dalam skema *Belt and Road Initiative (BRI)* ini. Salah satu ancaman dalam bidang pertahanan adalah mengenai ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan. Klaim *Nine-Dash Line* China juga termasuk kedalam wilayah Indonesia, yaitu di wilayah perairan pulau natuna, Laut Natuna Utara.

Selain isu mengenai keamanan kawasan, ancaman dalam bidang pertahanan juga terdapat dalam transfer teknologi yang dilakukan oleh Indonesia dan China. Khususnya

dalam bidang alutsista. Selain itu, identitas dari Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negara China juga menjadi salah satu perhatian dalam kerja sama BRI ini.

Kejadian ditangkapnya 5 orang WNA China saat melakukan pekerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini terjadi pada tahun 2016. Kelima orang tersebut mengenakan seragam militer China dan ditangkap oleh Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, karena memasuki area Halim Perdanakusuma tanpa izin. Saat ditangkap, mereka sedang melakukan pengeboran tanah di area tersebut.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, TKA China tersebut bukan tentara, melainkan kombatan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki izin kerja. Corporate Secretary PT Wijaya Karya, Suradi mengatakan para pekerja yang ditangkap TNI AU bukan merupakan karyawan perusahaan. (Warta Kota Tribun News.com, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ancaman dalam bidang pertahanan dalam kerja sama BRI, terdapat setidaknya 4 aspek yang *vulnerable* dengan adanya kerja sama tersebut. (1) Pertama, klaim *Nine-Dash Line* China di wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia. (2) Kedua, mengenai transfer teknologi terkait perdagangan alutsista Indonesia-China. (3) Ketiga, mengenai identitas Tenaga Kerja Asing asal China yang tidak memiliki izin untuk melakukan pekerjaannya, serta adanya indikasi merupakan kombatan atau komponen cadangan dari negara China. (4) Keempat, ancaman mengenai pengambilalihan infrastruktur sebagai konsekuensi atas kegagalan membayar hutang, khususnya dalam kasus Kereta Api Cepat Jakarta Bandung yang mana proyek tersebut bersinggungan dengan basis militer TNI AU di wilayah Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Ancaman dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruh Neo-imperialisme China dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI)

Selain dalam bidang pertahanan dan keamanan, dampak kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) ini juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Pengaruh Neo-Imperialisme China di Indonesia juga menjadi salah satu ancaman yang terdapat dalam kerja sama ini. Menurut Dr. Yono Reksoprodjo, (Wawancara, Desember 2020) salah satu

ancaman dalam bidang ekonomi adalah terkait pembayaran hutang dan pengambilalihan infrastruktur sebagai konsekuensi gagal bayar hutang dalam kerjasama BRI.

Selain itu, terdapat pula ancaman dari pengaruh neo-imperialisme China yang terdapat dalam kontrak *Turnkey Management Project* yang merupakan regulasi dari kerja sama BRI China di Indonesia. Aturan yang diterapkan dalam regulasi tersebut mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) China, pemakaian bahan baku atau material untuk pembangunan proyek dan transfer teknologi China di Indonesia. Hal tersebut adalah resiko dari negara lain yang bekerja sama dengan China, termasuk Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disintesis bahwa terdapat sudut pandang yang jauh dari sekedar bisnis, yaitu menyangkut (1) penguasaan sumber daya alam, (2) masuknya pengaruh dari kerja sama ekonomi tersebut terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia, serta (3) imbas pengaruh politik dalam tatanan dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menyusun strategi untuk menangkal ancaman yang mungkin terjadi dalam kerja sama BRI di Indonesia dengan sebaik mungkin.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Asimetris Bidang Ekonomi dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI)

Pemerintah Indonesia menerapkan skema "*Business to Business*" dalam kerja sama BRI di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir resiko gagal bayar hutang, dan hutang tersebut tidak dihitung sebagai hutang negara. Namun tentunya masih terdapat celah dalam skema '*Business to Business*' yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan keterlibatan BUMN dalam proyek BRI ini. Kereta Cepat Jakarta Bandung menjadi salah satu contoh proyek dimana BUMN masih terlibat dalam kerja sama yang seharusnya '*business to business*' ini. BUMN sejatinya adalah perusahaan milik negara, dan otomatis hutang tersebut berada dalam tanggung jawab negara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi "*business to business*" di dalam kerja sama BRI, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. (1) Pertama, mengenai keikutsertaan BUMN dalam proyek kerja sama BRI yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan swasta. (2) Kedua, mengenai pembagian saham dalam kerja sama BRI di

Indonesia. Dan (3) Ketiga, pengaruh politik yang menjadi dampak dari kerja sama BRI di Indonesia.

Strategi '*Business to Business*' ini nyatanya masih memiliki celah untuk merugikan Indonesia jikalau tidak mampu mengatasi ancaman yang terdapat dalam kerja sama tersebut, Untuk mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, dibutuhkan *contingency plan* dalam mengatasi permasalahan dapat timbul kedepannya.

***Contingency Plan* dalam Mengatasi Ancaman dari Kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI)**

Contingency plan dibutuhkan untuk menjadi pedoman mengenai langkah-langkah dan keputusan yang harus diambil ketika Indonesia berada dalam situasi sulit, terkait dengan kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI) ini. Beragam skenario terburuk dapat terjadi apabila Indonesia gagal membayar hutang terhadap China.

Politik luar Negeri bebas aktif Indonesia dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Indonesia dapat mengembangkan potensinya dalam bidang sumber daya alam dan menjalin kerja sama dengan negara lain untuk dapat membantu Indonesia mengatasi *worst case scenario* dalam kerja sama BRI tersebut. Indonesia dapat mencari keuntungan dengan melakukan kerja sama dengan negara lain dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia.

Selain itu, salah satu *contingency plan* dalam mengatasi gagal bayar hutang kerja sama BRI di Indonesia adalah dengan negosiasi ulang terkait perjanjian kerja sama tersebut. Skema penghapusan hutang juga dilakukan oleh beberapa negara yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang terhadap China. Kamerun, misalnya yang meminta penghapusan terhadap negara China sebesar US\$78.4 juta. Namun, penghapusan hutang tersebut tentu tidak semata pengampunan, namun juga terdapat motif politis didalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *contingency plan* yang dapat digunakan jika *worst case* seperti gagal bayar hutang terjadi di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan

beberapa strategi apabila terjadi kerugian di pihak Indonesia. (1) Pertama, dengan meningkatkan hubungan diplomatik di kawasan ASEAN dan negara yang memiliki ketegangan dengan China, dengan harapan akan membantu apabila Indonesia mengalami kesulitan dalam kerja sama BRI ini. (2) Kedua, dengan negosiasi ulang atas pembayaran hutang dalam perjanjian kerja sama tersebut. Yang (3) Ketiga, adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kerjasama *Belt and Road Initiative (BRI)* ini memiliki dua sisi yakni keuntungan dan kerugian. Indonesia harus mampu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk dan menyiapkan *contingency plan* agar mampu bertahan apabila mengalami kegagalan membayar hutang sebagai *worst-case scenario* dalam kerjasama BRI ini. Ancaman yang ada terdapat dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Dalam bidang pertahanan, sektor yang paling riskan untuk terancam adalah kedaulatan Indonesia atas klaim China di wilayah Natuna Utara, serta mengenai identitas dari pekerja China yang datang ke Indonesia sebagai bagian dari kerjasama BRI ini.

Dalam bidang ekonomi, penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pengambilalihan infrastruktur menjadi ancaman paling buruk yang akan dihadapi Indonesia apabila tidak mampu menghindari *debt trap* dari China.

Contingency Plan yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan menggunakan politik bebas aktif dengan sebaik-baiknya agar Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, melakukan negosiasi mengenai tenggat waktu dalam pembayaran hutang, serta memberdayakan potensi SDA di Indonesia dengan maksimal agar mampu memberi manfaat bagi Indonesia sehingga Indonesia bisa membayar hutang dalam kerjasama BRI ini.

Peneliti merekomendasikan seluruh instansi/lembaga terkait untuk dapat mengidentifikasi dan meningkatkan kewaspadaan mengenai ancaman asimetris dalam bidang ekonomi melalui hal-hal berikut:



- 1) Kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Maritim dan Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait pengkajian ulang mengenai kerja sama ekonomi internasional, khususnya yang menyangkut Sumber Daya Alam Indonesia.
- 2) Kepada Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, dengan harapan dapat membantu Indonesia apabila terkena *debt-trap* dari negara China.
- 3) Kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan agar menjadikan negara yang gagal menghadapi dampak negatif dari kerja sama BRI sebagai '*lesson learnt*' dalam membuat strategi dan *contingency plan* yang lebih terarah untuk menghadapi *worst case scenario* dalam kerja sama BRI di Indonesia.
- 4) Kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, terkait pendataan mengenai Tenaga Kerja Asing khususnya yang terkait dalam proyek kerja sama BRI dari negara China di Indonesia. Legalitas dan identitas tenaga kerja asing tersebut sangat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Indonesia.
- 5) Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal agar melakukan pemantauan secara menyeluruh dalam setiap proyek kerja sama BRI mengingat adanya beberapa kejadian ditangkapnya TKA ilegal dan *transfer of technology* yang bermasalah di beberapa wilayah.
- 6) Kepada perusahaan BUMN maupun swasta, serta lembaga yang mengatur terkait, atas dasar kerja sama BRI di Indonesia yang bersifat *Business to Business*, maka diharapkan perusahaan swasta nasional lah yang memegang peran, dengan tujuan untuk menghindari pembebanan hutang terhadap negara.

Daftar Pustaka

- Buffaloe, David L. (2006) *Defining Asymmetric Warfare*, The Institute Land Warfare Papers (AUSA)
- Bungin, Burhan (2007) "*Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, "*. Jakarta : Kencana
- Creswell, W. Johnl. (2011) "*Educational Research Fourth Edition*". Pearson



- Friedrich Ebert Stiftung (FES) Asia.org (2020) *"Indonesia's Global Maritime Fulcrum & China's Belt and Road Initiative: A Match Made at Sea?"* <https://www.fes-asia.org/news/indonesias-global-maritime-fulcrum-chinas-belt-road-initiative-a-match-made-at-sea/>
- Mhd Halkis, 2022, *Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu pengantar*, Unhan Press, Bogor
- Hobson, J.A. (2005). *"Imperialism: A Study "* New York: Cosimo, Inc
- Kementerian Pertahanan (2014) *"Buku Strategi Pertahanan Indonesia"* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan (2015) *"Buku Putih Pertahanan Indonesia"*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kompas.com (2021) *"Mengupas Kerja sama Investasi China di Indonesia"* <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia>
- Kurniawan, Y. (2016) *"One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal China?"* *Politica* Vol. 7 No. 2 November 2016 Universitas Indonesia
- Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Jointly Promoting Cooperation within the Framework of the Global Maritime Fulcrum Vision and the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative*
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *"Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3"* USA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung
- Priyono, Juniawan., Yusgiantoro, Purnomo. (2017). *"Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi"* Unhan Press, Bogor.
- Sugiyono (2015). *"Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)."* Bandung: Alfabeta.
- Supriyatno, Makmur. (2014) *"Tentang Ilmu Pertahanan."* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



- Tagar.com, (2019) *"Benarkah Nasib Indonesia Seperti Sri Lanka yang Dijebak Utang China?"*
<https://www.tagar.id/benarkah-nasib-indonesia-seperti-sri-lanka-yang-dijebak-utang-china>
- Tempo.co (2018) *"Ini Alasan Skema Kereta Cepat Jakarta-Bandung B to B"*
<https://bisnis.tempo.co/read/747842/ini-alasan-skema-kereta-cepat-jakarta-bandung-b-to-b/full&view=ok>
- Tsu, S., Giles, L. (2000) *"Sun Tzu on the Art of War"*. Leicester
- Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia
- Walt, Stephen M. (1987) *"The Origins of Alliance."* Cornell University Press.
- Waltz, Kenneth (1979) *"Theory of International Politics"* Reading, Mass: Addison-Wesley Pub.
- Warta Kota Tribun News.com (2016) *"5 Warga China Berpakaian Militer Ngebor di
Bandara Halim Ditangkap"* <https://wartakota.tribunnews.com/2016/04/28/5-warga-china-berpakaian-militer-ngebor-di-bandara-halim-ditangkap?page=2>